



BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dan pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau tentang bagaimana implementasi *e-Office* dan apa saja faktor yang menghambat implementasi *e-Office* pada badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Didalam mengimplementasikan *e-Office* di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau proses penyaluran komunikasi sudah berjalan baik, akan tetapi komunikasi belum dipahami dan dimengerti oleh pelaksana *e-Office* dikarenakan komunikasi yang belum jelas dan konsisten.

Sumber Daya (*Resources*) merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai *e-Office*. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang kompeten, maka pengimplementasian aplikasi *e-Office* tidak akan terlaksana dengan efektif. Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana *e-Office* di Badan



Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau diantaranya: Staf/ Sumber daya manusia yang sudah siap menjadi pelaksana *e-Office* hal ini dibuktikan dengan pendidikan terakhir yang dimiliki para pegawai mayoritas sarjana Strata 1 (SI) bahkan ada yang berpendidikan strata 3 (S3), tinggal lagi kesadaran staf akan pengimplementasian *e-Office*. Informasi mengenai pengelolaan *e-Office* belum didapatkan oleh pegawai, hal ini dikarenakan tenaga IT yang di utus oleh Diskominfotik Provinsi Riau tidak melakukan pelatihan secara bertahap agar semua staf/pegawai yang ada di Balitbang mengerti dan paham akan pengelolaan *e-Office*, serta pimpinan Balitbang yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pemilik wewenang dalam proses pengimplementasian *e-Office*. Namun dari segi fasilitas yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan *e-Office* di Balitbang sudah dapat dikatakan memadai untuk pelaksanaan *e-Office* tinggal lagi bagaimana Kepala Badan selaku atasan membuat inisiatif penegasan dan kebijakan dalam mendukung implementasi *e-Office*

Disposisi kecenderungan-kecenderungan sikap yang menjadi pengaruh dalam implementasi ada 2 yaitu pengangkatan birokrasi dan intensif. Dimana tidak adanya tindakan yang tegas dari pihak pelaksana kebijakan dalam melaksanakan *e-Office*. Apalagi pihak pimpinan Balitbang yang tidak memiliki inisiatif untuk menugaskan kepada para bawahanya untuk melaksanakan *e-Office*. Selain itu tidak adanya pemberian reward atau penghargaan dari pemerintah maupun dari Balitbang sendiri kepada pihak atau pegawai yang telah menggunakan *e-Office*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur birokrasi selain komunikasi, sumber daya, dan disposisi ada faktor lain yang juga mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yakni Struktur Birokrasi, dimana ada 2 bagian yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. SOP dalam implementasi *e-Office* mudah untuk dilaksanakan, serta waktu yang digunakan dalam proses surat menyurat dengan menggunakan *e-Office* tidak terlalu lama dan juga di Balitbang dalam pelaksanaan *e-Office* terdapat adanya kerjasama yang dilakukan antara Balitbang dengan Diskominfo. Dimana Balitbang dalam pengimplementasian *e-Office* dibantu oleh tenaga IT yang dikirim oleh Diskominfo.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-Office* pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau tidak terlaksana secara optimal dikarenakan beberapa faktor yang menghambat yaitu, komunikasi yang tidak konsisten, sumber daya Informasi yang kurang jelas, dan sumber daya Wewenang atasan/pimpinan yang tidak dimanfaatkan untuk mendukung implementasi *e-Office*.

6.2 Saran

- a. Pemerintah Provinsi Riau cq. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik agar merevisi Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan aplikasi perkantoran secara elektronik (*e-Office*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dengan mencantumkan sanksi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menggunakan *e-Office* didalam proses administrasi perkantoran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Kepala Badan/Dinas selaku atasan hendaknya menunjuk penanggung jawab pelaksanaan *e-Office* di setiap bidangnya atau menunjuk langsung Kepala Bidang/Bagian untuk mengontrol pelaksanaan *e-Office* agar *e-Office* bisa diterapkan secara menyeluruh didalam proses adminitrasi perkantoran.
- c. Tenaga IT yang di perbantukan dibeberapa OPD seharusnya melakukan pelatihan berkelanjutan, mulai dari pelatihan yang diadakan secara menyeluruh hingga pelatihan yang diadakan perbidang/bagian dalam waktu yang berbeda. Dengan tujuan agar semua pegawai paham dan mengerti bagaimana cara pengelolaan *e-Office* didalam proses administrasi perkantoran.
- d. Pemerintah (Gubernur) hendaknya menegaskan transparansi terhadap pelaksanaan *e-Office* dengan mengintruksikan kepada seluruh OPD dilingkungan pemerintah Provinsi Riau agar melaporkan perkembangan penggunaan *e-Office* dimasing-masing OPD. Kemudian memberikan reward/insentif kepada OPD yang telah melaksanakan *e-Office*. Karena dengan pemberian reward/intensif akan meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan *e-Office* dan *e-Office* akan berjalan secara optimal sehingga *e-Office* membudaya dalam administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.